



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER JAWA BARAT

Farhan Ryandi
Analisis Legislatif Ahli Pertama
farhan.ryandi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Program pendidikan karakter yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir dan mulai menarik perhatian publik. Program ini dinamakan Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang bertujuan membentuk kedisiplinan dan karakter peserta didik melalui metode pelatihan ala militer. Dalam pelaksanaannya, peserta didik dikirim ke barak militer di dua lokasi, yakni di Lembang dan Purwakarta, untuk mengikuti pelatihan intensif selama 14 hari. Peserta program ini merupakan siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan jenjang sekolah menengah atas (SMA) yang dianggap membutuhkan penguatan karakter dan kedisiplinan.

Namun, pelaksanaan program ini menuai sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah melakukan evaluasi langsung ke lapangan. KPAI mencatat sejumlah catatan kritis yang harus diperhatikan penyelenggara. Salah satu temuan utama adalah proses seleksi peserta program yang hanya didasarkan pada rekomendasi dari guru bimbingan konseling (BK) di sekolah masing-masing. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan bahwa seleksi seperti ini seharusnya dilandasi oleh asesmen psikologis profesional agar lebih objektif dan adil. Permasalahan semakin kompleks karena KPAI menemukan fakta bahwa terdapat sekolah, khususnya tiga SMP, yang tidak memiliki guru BK, tetapi tetap mengirimkan siswanya ke lokasi pelatihan di Purwakarta. Dalam wawancara dengan peserta, sebanyak 6,7 persen siswa mengaku tidak mengetahui alasan mereka diikutsertakan dalam program.

Lebih jauh, KPAI juga menyoroti dugaan adanya praktik intimidasi oleh pihak sekolah dalam mengikutsertakan siswa. Beberapa siswa dilaporkan menerima ancaman tidak naik kelas apabila menolak mengikuti program. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak-hak anak. Selain itu, mayoritas pembina di barak militer diduga belum memahami prinsip dasar perlindungan anak, yang dikhawatirkan dapat mengabaikan aspek kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan peserta selama program berlangsung. Fakta tersebut ditemukan KPAI di kedua lokasi program, yaitu Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, KPAI menegaskan pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang menjamin pelaksanaan program sesuai prinsip perlindungan anak.

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi mengapresiasi catatan yang disampaikan KPAI terhadap penyelenggaraan programnya. Ia mempersilakan KPAI untuk melanjutkan evaluasi terhadap programnya tersebut dan mengajak KPAI untuk bekerjasama dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak. Namun, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kebijakan program ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi anak-anak di Jawa Barat yang semakin kompleks. Ia mengaku kebijakan ini adalah program darurat yang didorong oleh rasa

kemanusiaan dan tanggung jawab. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa pihaknya belum membahas secara rinci perihal program tersebut. Namun demikian, ia memastikan bahwa persoalan ini akan segera dibahas dalam lingkup pimpinan untuk mendapat tindak lanjut yang tepat.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat memberikan saran kepada Kemendikdasmen agar memberikan pendampingan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat untuk memastikan program pendidikan karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa dapat dilaksanakan dengan baik. Program tersebut sebaiknya terukur dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada proses perencanaan misalnya, tahapan seleksi dapat disusun prosedur yang lebih baik dengan melibatkan sumber daya manusia yang profesional agar peserta program lebih tepat sasaran. Kemudian pada tahap pelaksanaan, sebagai contoh, dapat lebih memperhatikan hak-hak anak agar semua haknya terpenuhi selama mengikuti program. Pada tahap evaluasi, dapat dilakukan pengawasan terhadap anak yang sudah mengikuti program untuk melihat perbaikan pada kedisiplinan dan karakternya.

Sumber

kompas.com, 18 Mei 2025;
kumparan.com, 16 Mei 2025;
republika.co.id, 16 Mei 2025;
tempo.co, 18 Mei 2025.

Minggu ke-3 Mei
(12 s.d. 18 Mei 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*